

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Eksistensi Arbitrase Syariah di Indonesia	19
1. Eksistensi Arbitrase Syariah dalam Budaya Hukum Masyarakat Muslim Indonesia	19
2. Eksistensi Arbitrase Syariah dalam Hukum Positif Indonesia	21
3. Perkembangan Pengaturan Arbitrase Syariah di Indonesia.....	28
4. Putusan Arbitrase Syariah	31

B. Perjalanan Hukum Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah.....	33
1. Perkembangan Pengaturan Kekuasaan Kehakiman Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah	33
2. Perkembangan Pengaturan Kekuasaan Kehakiman Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah	36
C. Perkembangan Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah	42
D. Kedudukan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Indonesia.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Sifat Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Bahan Penelitian	59
D. Teknik dan Pengumpulan Data Penelitian	59
E. Analisis Data Penelitian.....	60
F. Jalannya Penelitian.....	60
G. Kesulitan dalam Penelitian.....	61
H. Cara Mengatasi Hambatan dalam Penelitian.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Penegasian Kewenangan Pengadilan Agama Atas Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah	64
1. Kepastian Hukum Eksekusi Putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Agama	64
2. Eksistensi Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Kewenangan Eksekusi Putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Agama.....	77

B. Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Agama Atas Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Pasca Lahirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.....	101
1. Latar Belakang Pembentukan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	101
2. Penerapan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Terhadap Eksekusi Putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Agama	103
BAB V PENUTUP	114
A. Simpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis-Jenis Arbitrase.....	25
Gambar 2. Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012	31
Gambar 3. Penerapan Teori Hans Nawiasky Pada Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Waktu Penyusunan Tesis.....	61
---	----